



BAB I PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun Anggaran 2020 adalah:

1. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan:
 - a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
 - b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
 - c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 - e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
 - f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, surplus/defisit, Laporan Operasional, Aset, kewajiban, ekuitas.



1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan:
 - a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
 - b. Menyediakan informasi mengenai bagaimana cara memperoleh sumber daya ekonomi dan apakah alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana mendanai seluruh program dan kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 - e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Flores Timur berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
 - f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat atas kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut maka laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-LO, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada bagian yang mengatur tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



-
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - n. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Daerah;
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;



- r. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 12);
- s. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
- t. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
- u. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 Nomor 2);

1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur disusun dan disajikan dengan sistematika, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja.

Bab III Ikhtisar Pencapaian kinerja Keuangan APBD

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target kinerja keuangan

Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 4.1. Laporan Realisasi Anggaran - LRA
- 4.2. Laporan Operasional – LO
- 4.3. Laporan Perubahan Ekuitas - LPE
- 4.4. Laporan Neraca
- 4.4. Catatan atas Laporan Keuangan - CaLK

Bab V Informasi Non Keuangan

Bab VI Penutup



BAB II
EKOMOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA APBD DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN FLORES TIMUR

2.1. Ekonomi Makro

SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang perindustrian dan perdagangan yang meliputi pembinaan di bidang perindustrian dan perdagangan dan sumber daya manusia.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan diharapkan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target penerimaan daerah. Anggaran Pendapatan Tahun 2020 sebesar Rp.20.000.000,00 dengan realisasi sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp.13.462.500,00. Kondisi pendapatan terserap sebesar 68,21%.

2.2.2. Kebijakan Belanja

Kebijakan Belanja diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah (value-added), sesuai capaian target visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang di dalam RPJMD.

Kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun secara terukur dengan memperhatikan kaedah-kaedah perencanaan. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Belanja pada dasarnya untuk membiayai kegiatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabuapten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.2.405.481.520,00 terealisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.2.356.375.138,00. Kondisi Belanja terserap sebesar 97,96%.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja.

Dalam penyusunan APBD Tahun 2020, rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja. Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan pada DPA SKPD-Dinas Perdagangan



dan Perindustrian tahun 2020 yang terdiri dari 8 Program dan 23 Kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan SKPD

KODE PRO/KEG	PROGRAM KEGIATAN	KELUARAN
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1.1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya pelayanan adm. keuangan
1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa pelayanan kebersihan
1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor
1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan
1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman
1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
1.20	Penyediaan Jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukunbg dan teknis perkantoran
02	Program Peningkatan Sarpras Aparatur	
02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen capaian kinerja SKPD
15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	
15.04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologian Daerah	Pelaksanaan Tera-Tera Ulang
15.08	Peningkatan pengawasan barang beredar (BDKT) dan pompa ukur BBM	Frekwensi pengawasan barang beredar
16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	
16.01	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah IKM tambak garam yang terfasilitasi
17	Program peningkatan kemampuan teknologi industry	
17.01	Pembinaan kemampuan teknologi industry	Jumlah lokasi bimtek
18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	
18.06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Tersedianya sistem jaringan dan informasi perdagangan



18.16	Pengambilan Data dan Publikasi Informasi Perdagangan	Tersedianya sistem jaringan dan informasi perdagangan
-------	--	---



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD TA.2020.

3.1.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1 Ikhtisar Pendapatan

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2020	%	REALISASI 2019 (AUDITED)
4	PENDAPATAN	20.000.000,00	13.642.500,00	68,21	68.512.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	20.000.000,00	13.642.500,00	68,21	68.512.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.000.000,00	13.642.500,00	68,21	19.500.000,00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	20.000.000,00	13.642.500,00	68,21	19.500.000,00
4.1.2.02.31	Retribusi Jasa Usaha Lainnya	20.000.000,00	13.642.500,00	68,21	19.500.000,00
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	49.012.000,00
4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	49.012.000,00
4.1.4.06.03	Retribusi Jasa Usaha Lainnya	0,00	0,00	0,00	49.012.000,00

3.1.2. Belanja

Realisasi belanja atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.2 Ikhtisar Belanja

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2020	%	REALISASI 2019 (AUDITED)
5	BELANJA	2,405,481,520.00	2,356,375,138.00	97.96	6,597,282,517.00
5.1	BELANJA OPERASI	2,405,481,520.00	2,356,375,138.00	97.96	4,104,912,404.00
5.1.1	Belanja Pegawai	1,426,971,470.00	1,396,542,989.00	97.87	1,442,449,454.00
5.1.2	Belanja Barang	978,510,050.00	959,832,149.00	98.09	2,218,428,150.00
5.1.5	Belanja hibah	-	-	-	444,034,800.00
5.2	BELANJA MODAL	-	-	-	2,492,370,113.00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	173,924,000.00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	2,318,446,113.00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-



Realisasi belanja atas program dan kegiatan dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 3.1.3. Realisasi program kegiatan

KODE PROG/ KEG	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	689.143.950	679.488.425	98,60	9.655.525
1.1.	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000	1.041.800	69,45	458.200
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	34.200.000	26.861.041	78,54	7.338.959
1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.525.000	5.076.184	91,88	448.816
1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	41.100.000	40.650.000	98,91	450.000
1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.447.000	1.447.000	100,00	-
1.10	Penyediaan alat tulis kantor	15.399.300	15.392.500	99,96	6.800
1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.475.000	11.460.000	99,87	15.000
1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.076.750	2.070.000	99,67	6.750
1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.740.000	1.260.000	72,41	480.000
1.17	Penyediaan makanan dan minuman	7.980.000	7.980.000	100,00	-
1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	166.500.900	166.049.900	99,73	451.000
1.20	Penyediaan Jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	400.200.000	400.200.000	100,00	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50.158.000	48.931.624	97,55	1.226.376
02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4.030.000	4.030.000	100,00	-
02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	43.528.000	42.301.624	97,18	1.226.376
02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.600.000	2.600.000	100,00	-
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12.909.800	12.909.800	100,00	-
05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	12.909.800	12.909.800	100,00	-
6	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	29.251.000	29.203.000	99,84	48.000
06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	29.251.000	29.203.000	99,84	48.000
15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	114.806.300	114.661.300	99,87	145.000
15.04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrolagian	51.353.500	51.348.500	99,99	5.000
15.08	Peningkatan pengawasan barang beredar (BDKT) dan pompa ukur BBM	63.452.800	63.312.800	99,78	140.000
16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	22.980.000	22.630.000	98,48	350.000
16.01	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	22.980.000	22.630.000	98,48	350.000
17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	14.922.500	14.922.500	100,00	-
17.01	Pembinaan kemampuan teknologi industri	14.922.500	14.922.500	100,00	-
18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	72.263.500	65.008.500	89,96	7.255.000
18.06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	27.954.600	27.904.600	99,82	50.000
18.16	Pengambilan data dan publikasi informasi perdagangan	44.308.900	37.103.900	83,74	7.205.000
JUMLAH		1.006.435.050	987.755.149	98,14	18.679.901

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Secara umum, tidak ada hambatan dan kendala yang dihadapi terkait pencapaian target yang telah ditetapkan. Meskipun setelah dilakukan refocusing anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19, semua Program dan Kegiatan masih dapat dilaksanakan dengan baik, kecuali pada Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri terkhusus Kegiatan Pengambilan Data dan Informasi Perdagangan, Belanja Publikasi tidak dapat dilaksanakan karena penyedia jasa publikasi yang sedianya akan mempublikasikan informasi perdagangan di media elektronik dan media cetak, yaitu RSPD Kab. Flores Timur dan Harian Umum Flores Pos, berhenti berproduksi akibat pandemi COVID-19



BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur dengan basis Akrua yang disajikan adalah pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penjelasan atas pos-pos Laporan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:

4.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN - LRA

4.1.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.13.642.500,00 dari target sebesar Rp.20.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2020	%	REALISASI 2019 (AUDITED)
4	PENDAPATAN	20.000.000,00	13.642.500,00	68,21	68.512.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	20.000.000,00	13.642.500,00	68,21	68.512.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.000.000,00	13.642.500,00	68,21	19.500.000,00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	20.000.000,00	13.642.500,00	68,21	19.500.000,00
4.1.2.02.31	Retribusi Jasa Usaha Lainnya	20.000.000,00	13.642.500,00	68,21	19.500.000,00
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	49.012.000,00
4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	49.012.000,00

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2020 hanya mencapai 68,21% dari target disebabkan karena pelaksanaan sidang tera / tera ulang (STTU) yang merupakan sumber retribusi jasa usaha lainnya tidak bisa dilaksanakan pada semua lokasi seperti biasanya. Anggaran yang telah di-refocusing sebagai akibat dari pandemic COVID-19 hanya memungkinkan pelaksanaan sidang tera / tera ulang (STTU) dilakukan di 4 (empat) lokasi/kecamatan.

4.1.2. Belanja

Realisasi Belanja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.2.356.375.138,00 atau 97,96% dari anggaran belanja sebesar Rp.2.405.481.520,00. Rinciannya anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut:



Tabel 4.1.2 Realisasi Anggaran Belanja

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2020	%	REALISASI 2019 (AUDITED)
5	BELANJA	2.405.481.520,00	2.356.375.138,00	97,96	6.597.282.517,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.405.481.520,00	2.356.375.138,00	97,96	4.104.912.404,00
5.1.1	Belanja Pegawai	1.426.971.470,00	1.396.542.989,00	97,87	1.442.449.454,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	978.510.050,00	959.832.149,00	98,09	2.662.462.950,00
5.1.5	Belanja hibah	-	-	-	-
5.2	BELANJA MODAL	-	-	-	2.492.370.113,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	173.924.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	2.318.446.113,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-

4.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.2.356.375.138,00 atau 97,96% dari anggaran belanja sebesar Rp.2.405.481.520,00. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.1.2,1 Realisasi Anggaran Belanja Operasi

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2020	%	REALISASI 2019 (AUDITED)
5.1	BELANJA OPERASI	2.405.481.520,00	2.356.375.138,00	97,96	4.104.912.404,00
5.1.1	Belanja Pegawai	1.426.971.470,00	1.396.542.989,00	97,87	1.442.449.454,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	978.510.050,00	959.832.149,00	98,09	2.662.462.950,00
5.1.5	Belanja hibah	-	-	-	-

4.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.1.396.542.989,00 atau 97,87% dari anggaran sebesar Rp.1.426.971.470,00. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.1.2.1.1 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2020	%	REALISASI 2019 (AUDITED)
5.1.1	Belanja Pegawai	1.426.971.470,00	1.396.542.989,00	97,87	1.442.449.454,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.354.466.470,00	1.324.039.989,00	97,75	1.361.893.454,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	44.580.000	44.580.000,00	100,00	45.780.000,00
5.1.1.07	Belanja Uang Lembur	27.925.000	27.923.000,00	99,99	34.776.000,00

4.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 959.832.149,00 atau 98,09 % dari anggaran belanja sebesar Rp.978.510.050,00. Rinciannya sebagai berikut:





Tabel 4.1.2.1.2 Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES. 2020	%	REALISASI 2019 (AUDITED)
5,1,2	Belanja Barang dan Jasa	978.510.050,00	959.832.149,00	98,09	2.662.462.950,00
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.591.050,00	44.298.624,00	97,17	64.815.500,00
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	100,00	24.400.000,00
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.810.000,00	30.562.841,00	66,72	89.550.600,00
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.725.000,00	26.078.684,00	97,58	18.660.500,00
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.463.800,00	12.448.800,00	99,88	47.321.800,00
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	5.400.000,00
5.1.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	11.750.000,00
5.1.2.09	Belanja sewa alat berat	-	-	-	35.800.000,00
5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	-	-	-
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.556.000,00	11.510.000,00	99,60	37.417.500,00
5.1.2.13	Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	-
5.1.2.14	Belanja pakaian khusus hari hari tertentu	-	-	-	-
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	378.184.200,00	377.203.200,00	99,74	1.352.347.250,00
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	6.630.000,00	6.630.000,00	100,00	20.700.000,00
5.1.2.20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	-	444.034.800,00
5.1.2.25	Belanja Honorarium PNS	43.350.000,00	42.900.000,00	98,96	106.615.000,00
5.1.2.26	Belanja Honorarium Non PNS	400.200.000,00	400.200.000,00	100,00	403.650.000,00

4.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL – LO

4.2.1 Pendapatan LO

Jumlah Pendapatan untuk periode yang periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.13.642.500,00 dan Rp.68.512.000,00 adalah merupakan Pendapatan LO. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.2.1 Pendapatan LO

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2020	%	REALISASI 2019 (AUDITED)
4	PENDAPATAN - LRA	20.000.000	13.642.500	68,21	68.512.000
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	20.000.000	13.642.500	68,21	68.512.000
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LO	-	-	-	-
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	20.000.000	13.642.500	68,21	19.500.000
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	-	-	-	-
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	-	-	-	49.012.000

4.2.2 Beban – LO

4.2.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.1.396.542.989,00 dan tahun 2019 sebesar Rp.1.436.017.454,00 atau mengalami penurunan sebesar 2,75%.



Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian beban pegawai per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sbb:

Tabel 4.2.2.1 Beban Pegawai

URAIAN REKENING BEBAN	31 DES 2020	TA 2019 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURUNAN) %
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1.324.039.989,00	1.361.893.454,00	(2,78)
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	44.580.000,00	45.780.000,00	(2,62)
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	0,00
Beban Uang Lembur - LO	27.923.000,00	28.344.000,00	0,00
Jumlah Beban Pegawai LO	1.396.542.989,00	1.436.017.454,00	(2,75)

4.2.2.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.44.798.624,00 dan tahun 2019 sebesar Rp.88.330.500,00 atau mengalami penurunan sebesar 49,28%.

Beban Persediaan merupakan beban yang mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.2.2 Beban Persediaan

URAIAN REKENING BEBAN	31 DES 2020	TA 2019 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURUNAN) %
Beban Bahan Pakai Habis	44.298.624,00	63.930.500,00	(30,71)
Beban Persediaan Bahan/ Material	500.000,00	24.400.000,00	(97,95)
Jumlah Beban Persediaan LO	44.798.624,00	88.330.500,00	(49,28)

4.2.2.3 Beban Barang

Jumlah Beban Barang periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.23.958.800,00 dan tahun 2019 sebesar Rp.78.129.300,00 atau mengalami penurunan sebesar 69,33%.

Beban Barang merupakan beban yang mencatat konsumsi atas barang cetak dan penggandaan, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.2.3 Beban Barang



URAIAN REKENING BEBAN	31 DES 2020	TA 2019 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURUNAN) %
Beban Cetak dan Penggandaan	12.448.800,00	43.711.800,00	(71,52)
Beban Makanan dan Minuman	11.510.000,00	34.417.500,00	(66,56)
Jumlah Beban Barang LO	23.958.800,00	78.129.300,00	(69,33)

4.2.2.4 Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.481.162.841,00 dan tahun 2019 sebesar Rp.563.475.600,00 atau mengalami penurunan sebesar 14,61%.

Beban jasa merupakan konsumsi atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian beban jasa periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.2.4 Beban Jasa

URAIAN REKENING BEBAN	31 DES 2020	TA 2019 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURUNAN) %
Beban Jasa Kantor	30.562.841,00	89.550.600,00	(65,87)
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	-	-	-
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	5.400.000,00	(72,22)
Beban Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	2.000.000,00	200,00
Beban Sewa Alat Berat	-	-	-
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	-	-
Beban Jasa Konsultasi	-	-	-
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	-	-	-
Beban Honorarium PNS - LO	42.900.000,00	66.325.000,00	-
Beban Honorarium Non PNS - LO	400.200.000,00	400.200.000,00	-
Jumlah Jasa LO	481.162.841,00	563.475.600,00	(14,61)

4.2.2.5. Beban Barang Diserahkan

Beban barang diserahkan merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. Beban barang diserahkan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp.0,00 dan 2019 adalah Rp. 444.034.800,00.

4.2.2.6. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.32.708.684,00 dan tahun 2019 sebesar Rp.39.360.500,00 atau mengalami penurunan sebesar 16,90%.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.6 Beban Pemeliharaan



URAIAN REKENING BEBAN	31 DES 2020	TA 2019 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURUNAN) %
Beban Pemeliharaan kendaraan	26.078.684,00	18.660.500,00	39,75
Beban Pemeliharaan Tanah	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.600.000,00	5.700.000,00	(54,39)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.030.000,00	15.000.000,00	-
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan			-
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			-
Jumlah Beban Pemeliharaan LO	32.708.684,00	39.360.500,00	(16,90)

4.2.2.7. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban perjalanan dinas periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.377.203.200,00 dan tahun 2019 sebesar Rp.1.268.107.250, atau mengalami penurunan sebesar 70,25%.

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.7 Beban Perjalanan Dinas

URAIAN REKENING BEBAN	31 DES 2020	TA 2019 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURUNAN) %
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	203.330.000,00	449.670.000,00	(54,78)
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	173.873.200,00	818.437.250,00	(78,76)
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri			-
Beban Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah			-
Beban Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah			-
Jumlah Beban Perjalanan Dinas LO	377.203.200,00	1.268.107.250,00	(70,25)

4.2.2.8. Beban Lain-Lain

Beban lain-lain merupakan beban yang terjadi akibat penyesuaian ekstrakompeteble bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar. Beban hibah periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp.0,00 dan 2019 adalah Rp.9.000.000,00.

4.2.3. Surplus / Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit dari kegiatan operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.(2.342.732.638,00) dan Rp.(3.857.943.404 atau mengalami penurunan sebesar 39,28%.

4.2.4. Surplus / Defisit LO

Surplus (Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.(2.342.732.638,00) dan Rp.(3.857.943.404 atau mengalami penurunan sebesar 39,28%. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

4.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

4.3.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing masing sebesar Rp.22.968.890.734,00 dan Rp.20.071.113.021,00



4.3.2 .Surplus / Defisit LO

Jumlah Surplus / Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.(2.342.732.638,00) dan Rp.(3.857.943.404,00). Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

4.3.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Dampak kumulatif perubahan kebijakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.434.688.186,00 dan Rp.0,00, merupakan koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset dan koreksi ekuitas

4.3.3.1 .Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

4.3.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih revaluasi aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

4.3.3.3.Koreksi ekuitas lainnya

Koreksi ekuitas lainnya merupakan koreksi atas aset lancar berupa penyesuaian/reklasifikasi dari ekstrakompeteble ke aset lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.434.688.186,00 dan Rp.0,00

4.3.4 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Jumlah kewajiban untuk dikonsolidasikan untuk 31 Desember 2020 sebesar Rp.2.342.732.638,00 dan tahun 2019 sebesar Rp.0,00

4.3.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.23.403.578.920,00 dan Rp.16.213.169.617,00

4.4 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

4.4.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp 0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau per tanggal neraca.

4.4.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Rp 0,00



Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar masing-masing Rp.0,00 dan Rp.0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4.4.3. Persediaan Rp 0,00

Merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jumlah Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar masing-masing Rp.0,00 dan Rp.0,00

4.4.4. Tanah Rp 3.600.000,00

Nilai aset tetap Tanah yang dimiliki SKPD untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.3.600.000,00 dan Rp.3.600.000,00. Nilai aset tetap Tanah berasal dari pembelian tanah di Tahun 2018. dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.4.4 Aset Tetap Tanah

KODE REKENING	URAIAN	SALDO 2020 (UNAUDITED)	SALDO 2019 (AUDITED)	KENAIKAN / PENURUNAN	TREND
1 . 3 . 1	TANAH				
1 . 3 . 1 . 01	Tanah Persil	-	-	-	-
1 . 3 . 1 . 02	Tanah Non Persil	-	-	-	-
1 . 3 . 1 . 03	Lapangan'	-	-	-	-
1 . 3 . 1 . 61	Tanah Perkampungan	-	-	-	-
1 . 3 . 1 . 62	Tanah Pertanian	-	-	-	-
1 . 3 . 1 . 63	Tanah Perkebunan	-	-	-	-
1 . 3 . 1 . 66	Kolam Ikan	-	-	-	-
1 . 3 . 1 . 71	Tanah Untuk Bangunan Gedung	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-
1 . 3 . 1 . 73	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	-	-	-	-
	JUMLAH	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-

Mutasi nilai aset tetap Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

TANAH	PENAMBAH	PENGURANG	KENAIKAN / PENURUNAN
SALDO AWAL	3.600.000		
REALISASI BELANJA MODAL/PEMBELIAN	-		
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
Extrakompatabe	-	-	-
Pindah antar Aset	-	-	-
Pindah antar Entitas	-	-	-
Hibah	-	-	-
Hasil Sensus	-	-	-
Tindak LanjutLHP	-	-	-
Reklas dari Extrakompatabe	-	-	-
Reklas ke Aset Lain-Lain	-	-	-
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan			
Persediaan			18 -
JUMLAH	-	-	-
MUTASI +/-	-		
SALDO AKHIR	3.600.000		



Berdasarkan KIB A, saldo aset tetap Tanah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp.3.600.000,00. Tidak ada mutasi penambahan/pengurangan.

4.4.5. Peralatan dan Mesin

Rp 2.766.168.540,00

Nilai aset tetap Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp.2.766.168.540,00 dan Rp.2.766.168.540,00. Rinciannya sebagai berikut:



Tabel 4.4.5 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

KODE REKENING	PERALATAN DAN MESIN	SALDO 2020 (UNAUDITED)	SALDO 2019 (AUDITED)	KENAIKAN / PENURUNAN	TREND
1 . 3 . 2 . 01	ALAT-ALAT BERAT - ALAT BESAR				
1 . 3 . 2 . 01 . 01	Alat-Alat Besar Darat	-	-	-	-
1 . 3 . 2 . 01 . 02	Alat-Alat Besar Apung	-	-	-	-
1 . 3 . 2 . 01 . 03	Alat Bantu	-	-	-	-
1 . 3 . 2 . 02	ALAT-ALAT ANGKUTAN				
1 . 3 . 2 . 02 . 04	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.083.674.000,00	1.083.674.000,00	-	-
1 . 3 . 2 . 02 . 05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-	-
1 . 3 . 2 . 02 . 06	Alat Angkut Apung Bermotor	-	-	-	-
1 . 3 . 2 . 02 . 07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	-	-	-	-
1 . 3 . 2 . 03	ALAT BENGKEL DAN UKUR				
1 . 3 . 2 . 03 . 09	Alat Bengkel Bermesin	116.725.000,00	116.725.000,00	-	-
1 . 3 . 2 . 03 . 10	Alat Bengkel Tak Bermesin	62.725.000,00	62.725.000,00	-	-
1 . 3 . 2 . 03 . 11	Alat Ukur	501.030.000,00	501.030.000,00	-	-
1 . 3 . 2 . 04	ALAT PERTANIAN				
1 . 3 . 2 . 04 . 12	Alat Pengolahan	-	-	-	-
1 . 3 . 2 . 05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
1 . 3 . 2 . 05 . 13	Alat Kantor	109.553.220,00	92.997.920,00	16.555.300	-
1 . 3 . 2 . 05 . 14	Alat Rumah Tangga	516.434.320,00	685.648.620,00	(169.214.300)	-
1 . 3 . 2 . 05 . 15	Komputer	211.168.000,00	211.168.000,00	-	-
1 . 3 . 2 . 05 . 16	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.200.000,00	12.200.000,00	-	-
1 . 3 . 2 . 06	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI				
1 . 3 . 2 . 06 . 17	Alat Studio	-	-	-	-
1 . 3 . 2 . 06 . 18	Alat Komunikasi	-	-	-	-
1 . 3 . 2 . 06 . 19	Peralatan Pemancar	-	-	-	-
1 . 3 . 2 . 08	ALAT LABORATORIUM				
1 . 3 . 2 . 08 . 20	Unit-unit Laboratorium	-	-	-	-
1 . 3 . 2 . 08 . 21	Alat Peraga/Praktek Sekolah	-	-	-	-
1 . 3 . 2 . 08 . 22	Alat Laboratorium Kimia Nuklir	-	-	-	-
1 . 3 . 2 . 08 . 23	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	-	-	-	-
1 . 3 . 2 . 08 . 24	Alat Laboratorium Standarisai Kalibrasi dan Instrumensasi	-	-	-	-
1 . 3 . 2 . 08 . 25	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	-	-	-	-
1 . 3 . 2 . 15	ALAT SAR	-	-	-	-
1 . 3 . 2 . 15 . 48	Alat Pendukung Pencarian	152.659.000,00	-	152.659.000	-
	JUMLAH	2.766.168.540,00	2.766.168.540,00	-	

Mutasi nilai aset tetap Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERALATAN DAN MESIN	PENAMBAH	PENGURANG	KENAIKAN / PENURUNAN
SALDO AWAL	2.766.168.540		
REALISASI BELANJA MODAL/PEMBELIAN	-		
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
Extrakompatabe	-	-	-
Pindah antar Aset	-	-	-
Pindah antar Entitas	-	-	-
Hibah	-	-	-
Hasil Sensus	-	-	-
Tindak LanjutLHP	-	-	-
Reklas dari Extrakompatabe	-	-	-
Reklas ke Aset Lain-Lain	-	-	-
Persediaan	-	-	-
JUMLAH	-	-	-
MUTASI +/-	-		
SALDO AKHIR	2.766.168.540		

Berdasarkan KIB B, saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp.3.280.821.690,00. Mengalami mutasi berkurang sebesar Rp.514.653.150 yang terdiri dari penghapusan akibat rusak berat sebesar Rp.495.627.150,00 dan reklasifikasi menjadi Aset Lainnya sebesar Rp.19.026.000,00.



4.4.6. Gedung dan Bangunan Rp 18.271.287.384,00

Nilai aset tetap Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp.18.271.287.384,00 dan Rp.18.271.287.384,00. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.4.6 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

GEDUNG DAN BANGUNAN	SALDO 2020 (UNAUDITED)	SALDO 2019 (AUDITED)	KENAIKAN / PENURUNAN	TREND
1. BANGUNAN GEDUNG				
Bangunan Gedung Tempat Kerja	18.271.287.384,00	18.271.287.384,00	-	-
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-		-
2. MONUMEN				
Bangunan Sejarah	-	-	-	-
Tugu Peringatan	-	-	-	-
Monumen / Bangunan Bersejarah	-	-	-	-
Rambu-Rambu	-	-	-	-
Candi / Tugu Peringatan / Prasasti	-	-	-	-
Tugu / Titik Kontrol Past	-	-	-	-
JUMLAH	18.271.287.384,00	18.271.287.384,00	-	-

Mutasi nilai aset tetap Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERALATAN DAN MESIN	PENAMBAH	PENGURANG	KENAIKAN / PENURUNAN
SALDO AWAL	18.271.287.384		
REALISASI BELANJA MODAL/PEMBELIAN	-		
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
Extrakompatabel	-	-	-
Pindah antar Aset	-	-	-
Pindah antar Entitas	-	-	-
Hibah	-	-	-
Hasil Sensus	-	-	-
Tindak LanjutLHP	-	-	-
Reklas dari Extrakompatabel	-	-	-
Reklas ke Aset Lain-Lain	-	-	-
Persediaan	-	-	-
JUMLAH	-	-	-
MUTASI +/-	-		
SALDO AKHIR	18.271.287.384		

Berdasarkan KIB C, saldo Gedung dan Bangunan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp.19.087.482.135,00. Mengalami mutasi berkurang sebesar Rp.818.194.751,00 akibat reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya.

4.4.7. Jalan Irigasi dan Jaringan Rp 1.454.806.660,00

Nilai aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp.1.454.806.660,00 dan Rp.1.454.806.660,00. Rinciannya sebagai berikut:



Tabel 4.4.7 Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

NO	JALAN JARINGAN DAN IRIGASI	SALDO 2020 (UNAUDITED)	SALDO 2019 (AUDITED)	KENAIKAN / PENURUNAN	TREND
1	JALAN DAN JEMBATAN				
	Jalan	812.633.810,00	812.633.810,00	-	-
	Jembatan	-	-	-	-
2	BANGUNAN AIR / IRIGASI				
	Bangunan Air Irigasi	192.772.850,00	192.772.850,00	-	-
	Bangunan Air Pasang Surut	-	-	-	-
	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	-	-	-	-
	Bangunan Air Bersih/Baku	-	-	-	-
3	INSTALASI				
	Instalasi Air Minum/Air Bersih		-	-	-
	Instalasi Air Kotor	-	-	-	-
	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	-	-	-	-
	Instalasi Pembangkit Listrik	288.900.000,00	288.900.000,00	-	-
	Instalasi Gardu Listrik	-	-	-	-
4	JARINGAN				
	Jaringan Air Minum	-	-	-	-
	Jaringan Listrik	160.500.000,00	160.500.000,00	-	-
	JUMLAH	1.454.806.660,00	1.454.806.660,00	-	-

Mutasi aset Jalan irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut :

PERALATAN DAN MESIN	PENAMBAH	PENGURANG	KENAIKAN / PENURUNAN
SALDO AWAL	1.454.806.660		
REALISASI BELANJA MODAL/PEMBELIAN	-		
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
Ekstrakompatabel	-	-	-
Pindah antar Aset	-	-	-
Pindah antar Entitas	-	-	-
Hibah	-	-	-
Hasil Sensus	-	-	-
Tindak LanjutLHP	-	-	-
Reklas dari Ekstrakompatabel	-	-	-
Reklas ke Aset Lain-Lain	-	-	-
Persediaan	-	-	-
JUMLAH	-	-	-
MUTASI +/-	-		
SALDO AKHIR	1.454.806.660		

Berdasarkan KIB D, saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.603.815.770,00. Mengalami mutasi berkurang sebesar Rp.149.009.110,00 yang merupakan penyesuaian akibat reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya sebesar Rp.72.495.585,00 dan penyesuaian akibat reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Barang Ekstrakomptabel sebesar Rp.76.513.525,00.





4.4.8. Aset Lain-Lain

Rp 907.716.336,00

Nilai Aset Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp.907.716.336,00 dan Rp.473.028.150,00 atau mengalami kenaikan sebesar 91,89%. Aset Lain-Lain ini merupakan merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam kondisi rusak berat dan/atau tidak lagi dipergunakan untuk operasional kantor tetapi belum diusulkan pemutihan/penghapusan sehingga dilakukan reklasifikasi.

Rinciannya adalah reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp.19.026.000, Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp.816.194.751 dan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.72.495.585

4.4.9. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Rp 0,00

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp.0,00 dan Rp.0,00 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain merupakan kontra Aset Lain-Lain yang disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lain-Lain.

4.4.9. Ekuitas

Rp 23.403.578.920,00

Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.23.403.578.920,00 dan Rp.22.968.890.734,00, mengalami kenaikan sebesar Rp.434.688.186,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

4.5 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



BAB V INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu SKPD yang ada di wilayah Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang beralamat di:

- Jalan : San Juan
- Nomor : 210
- Telepon : (0383) 21271
- Fax. : (0383) 21271

Dasar pembentukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur berdasarkan Perda Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur. SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur di pimpin oleh Siprianus Sina Ritan, S.Sos.M.Si sesuai Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKPP.821.01/02/PKM/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan Tahun Anggaran 2020, SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga tenaga Non PNS yang terdidik dan terampil, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Pegawai Berdasarkan Eselonering

NO	ESELON	JENJANG PENDIDIKAN						Jumlah
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	II					-	1	1
2	III	-	-	-	-	3	1	4
3	IV			1	1	6		8
4	Non Eselon	-	-	3	1	4	-	8
	Jumlah PNS	-	-	4	2	13	2	21
5	Honorer	2	3	14	4	6		29
	Total Pegawai	2	3	18	6	19	2	50

Tabel 5.2 Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	PENDIDIKAN	GOLONGAN					Honorer
		I	II	III	IV	Jumlah PNS	
1	S2	-			2	2	
2	S1	-	-	10	3	13	6
3	Diploma	-	1	1	-	2	4
4	SMA	-	-	4	-	4	14
5	SMP	-	-	-	-	-	3
6	SD	-				-	2
	Jumlah PNS	-	1	15	5	21	-
	Honorer						29
	Total Pegawai	-	1	15	5	21	50



Tabel 5.3 Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin								
NO	JENIS KELAMIN	JENJANG PENDIDIKAN						Jumlah
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	Laki Laki	-	-	2	2	5	2	11
2	Perempuan	-	-	3	-	7		10
	Jumlah PNS	-	-	5	2	12	2	21
3	Honorer Laki Laki	2	3	9	3	4		21
4	Honorer Perempuan			5	1	2		8
	Honorer	2	3	14	4	6	-	29
	Total Pegawai	2	3	19	6	18	2	50



BAB VI PENUTUP

Dari Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020, dapat disimpulkan bahwa rencana-rencana strategis yang ditetapkan tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan pandemic covid-19 yang memaksa pemerintah harus melakukan refocusing anggaran untuk mendukung percepatan penanganan covid-19 dan dampaknya.

Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan meningkatkan transparansi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang yang berlaku dalam penyampaian laporan keuangan.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan dan kegiatan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini disajikan sesuai dengan kondisi objektif, dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan diperiode berikutnya.

Larantuka, 04 Januari 2021

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Flores Timur,

Siprianus Sina Ritan, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19701231 199903 1 056